

Viral, Petugas Kesehatan Cium Pria Saat Tes Swab Covid-19

JAKARTA (IM) - Sebuah video yang memperlihatkan petugas kesehatan yang tiba-tiba mencium seorang warga yang akan dites swab viral di media sosial, memicu reaksi dari warganet.

Dalam video yang beredar, awalnya terlihat seorang laki-laki dengan masker yang sudah diturunkan, bersiap-siap untuk dites swab. Kemudian karena sedikit khawatir atau takut, laki-laki tersebut menutup matanya.

Saat siap-siap untuk diambil sampel swab dari hidungnya, tiba-tiba saja petugas kesehatan di depannya menciumnya.

Tindakan petugas yang mengenakan seragam Pemprov DKI itu mengejutkan pria tersebut, yang langsung membuka mata dan mengumpat.

"B*bi. Puih, bercanda melulu ah," kata laki-laki

yang dicium tersebut terlihat kesal sementara orang-orang di sekeliling mereka tampak tertawa. Diduga, laki-laki yang dicium dan petugas yang mencium sudah saling kenal.

Video itu menjadi viral setelah diposting oleh beberapa akun di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Belum diketahui lokasi tes tersebut.

Warganet memberikan reaksi beragam terkait video tersebut. Ada yang marah, menganggapnya sebagai pelecehan seksual, namun ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah guyanan belaka.

Bagaimana pun, tindakan mencium seseorang saat melakukan tes swab merupakan pelanggaran protokol kesehatan, meski dilakukan dengan mengenakan masker. Tindakan petugas kesehatan tersebut berpotensi menularkan virus korona. ● yan

Positif Covid-19, Bupati Bekasi Dirawat di Siloam Tangerang

BEKASI (IM) - Bupati Bekasi, Eka Supriatmaja, terkonfirmasi positif Covid-19. Kini, Eka menjalani perawatan di intensif di RS Siloam Tangerang. Hasil tes polymerase chain reaction (PCR) Eka diketahui positif pada Kamis (1/7) lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainarti mengatakan, Eka dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Kelapa Dua Tangerang, sejak Minggu (4/7).

"Saat ini bapak Bupati dalam kondisi cukup stabil, kondisi jantung dan tekanan darah normal, namun karena beliau ada komorbid jadi harus dilakukan perawatan di Ruang ICU," kata Sri Enny, dalam keterangan resmi, Senin (5/7).

Adapun, pada Minggu (4/7) kemarin, jumlah kasus baru positif Covid-19 bertambah 146 orang. Kasus aktif di Kabupaten Bekasi masih tersebar di 23 kecamatan.

Tujuh kecamatan dengan kasus tertinggi berada

di Tambun Selatan 353 orang, Cibitung 290 orang, Cikarang Barat 263 orang, Setu 202 orang, Cikarang Selatan 195 orang, Babelan 156 orang dan Serang Baru 122 orang.

"Kemudian Karangbahagia 77 orang, Cikarang Utara 76 orang, Tarumajaya 69 orang, Cikarang Timur 68 orang, Cikarang Pusat 64 orang, Sukakarya 59 orang," dikutip dari laman resmi Pemkab, Senin (5/7).

Selanjutnya, Cabangbungin 46 orang, Bojongmangu 44 orang, Tambun Utara 44 orang, Pebayuran 35 orang, Cibarusah 27 orang, Kedungaringin 17 orang, Sukatani 16 orang, Muaragembong 9 orang, Sukawangi 7 orang dan Tambelang 5 orang.

Total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi sebanyak 33.396 orang. Dari jumlah tersebut, 30.824 orang sudah dinyatakan sembuh, 328 orang meninggal dunia, 497 orang dirawat di rumah sakit dan 1.747 orang menjalani isolasi mandiri. ● yan



FOTO: ANT

KEPADATAN JALUR ALTERNATIF IMBAS PENYEKATAN

Kepadatan kendaraan yang terjadi di jalur alternatif perbatasan Depok dan Jakarta di Jalan Setu Pedongkelan, Depok, Jawa Barat, Senin (5/7). Kepadatan tersebut karena pengendara memilih melintasi jalur alternatif atau jalur tikus imbas dari penyekatan PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor.

Anies Pastikan Pasokan Oksigen ke RS di DKI Lancar

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau posko oksigen di kawasan Monumen Nasional, Senin (5/7) pagi. Dalam video yang diunggah di akun Instagram, Anies terlihat berbincang dengan beberapa petugas di posko tersebut.

Sebelumnya, kemarin, posko oksigen itu didirikan untuk membantu menangani apabila ada RS rujukan Covid-19 yang membutuhkan pasokan oksigen sesegera mungkin. Petugas yang berada di posko tersebut merupakan petugas gabungan dari berbagai SKPD yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan SKPD lainnya seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan lain-lain.

"Ya jadi sudah sejak 10 hari yang lalu, kita memang koordinasi terus. Nah, di sini di Monas disiapkan posko oksigen sehingga RS RS itu yang membutuhkan dan ada kebutuhan ekstra bisa ke sini kemudian nanti oleh tim akan diambilkan oksigen dari beberapa lokasi," kata Anies. Petugas akan mengam-

bil langsung pasokan oksigen ke distributor maupun produsen secara langsung. Armada truk lintas SKPD juga dikerahkan untuk pengantaran. "Di sini khusus ke Cilegon di Krakatau Steel. Kemudian dibawa, diambil. Jadi kita mengerahkan bukan hanya Dinas Kesehatan tapi ini truk-truk dari dinas SDA, kemudian tanangnya juga dari berbagai dinas. Semuanya sekarang bekerja untuk menangani kebutuhan untuk penanganan covid. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing. Yang punya truk disiapkan truk, punya orang kirim orang," jelasnya.

Setiap RS yang membutuhkan oksigen dipersiapkan membawa maksimal 10 tabung oksigen ukuran besar ke posko. Petugas posko kemudian akan mengantar ke produsen untuk diisi ulang. Menurut Anies dengan begini petugas RS hanya fokus pada penanganan covid-19.

"Jadi RS bawa tabung kemudian akan kita kirim untuk diisi. Nanti RS yang ambil di sini, supaya RS tidak pergi ke tempat yang jauh," ungkapnya. ● pp

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



JIKA PERKANTORAN ABAIKAN PERATURAN

Anies: Laporkan, akan Kami Tindak!

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta perusahaan agar mentaati peraturan dan tidak memaksa karyawan untuk masuk kerja. Perusahaan harus mentaati keputusan pemerintah yang telah menetapkan hanya sektor esensial dan sektor kritikal yang bisa berkegiatan di masa PPKM darurat.

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta warga melapor apabila perusahaan non-esensial, memaksa masuk ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ia pun men-

jamin akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Bagi karyawan yang bekerja di sektor non esensial dan perusahaannya memaksa untuk bekerja, laporkan lewat JAKI. Anda laporkan di situ. Biar nanti tim kita bertindak,"

ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (5/7).

Anies pun mengingatkan agar perusahaan taat pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Diketahui, hanya pekerja sektor esensial dan kritikal yang di perbolehkan berkegiatan diluar selama PPKM Darurat dengan protokol kesehatan ketat.

"Perusahaan-perusahaan harus mentaati keputusan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan hanya sektor esensial dan sektor kritikal yang bisa berkegiatan di masa PPKM darurat," ucapnya.

Kemudian, Anies mengagaskan PPKM Darurat bukan sekadar mengosongkan Kota Jakarta. Melainkan upaya

menekan laju penyebaran kasus Covid-19.

"Ini bukan membatasi untuk mengosongkan kota Jakarta untuk membuat lalu lintas menjadi lengang. Ini untuk menyelamatkan. Ini gerakan penyelamatan warga," tegasnya.

Lebih lanjut, Anies meminta perusahaan agar mentaati peraturan. Jangan memaksa para karyawan untuk masuk.

"Jadi mari kita ikut menjadi bagian dari penyelamatan. Kasihan para karyawan kalau pimpinan perusahaannya terus memaksakan mereka harus masuk padahal bukan sektor esensial," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah titik penyekatan di perbatasan Kota Jakarta mengalami kemacetan. Hal itu menunjukkan masih adanya mobilitas warga untuk bekerja di Ibu Kota. ● yan

SETELAH 60 PEGAWAI TERPAPAR COVID-19

RSUD Bekasi Butuh Tambahan Nakes

BEKASI (IM) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengumumkan membutuhkan tambahan tenaga kesehatan guna memaksimalkan penanganan pasien terpapar Covid-19 di daerah itu.

"Kalau memungkinkan ada relawan yang ditempatkan di RSUD, itu pasti akan banyak membantu. Sebab saat ini kami memiliki persoalan pada penanganan Covid-19 akibat minimnya jumlah nakes," kata Direktur Utama RSUD Kabupaten Bekasi, dr Sumarti di Cikarang, Senin (5/7).

Dia mengungkap kondisi itu terjadi setelah sekitar 60 tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Bekasi ikut terpapar Covid-19 usai menangani pasien yang masuk pascabilir Lebaran 2021 sehingga jumlah tenaga yang ada saat ini relatif minim sementara pasien terus berdatangan.

Puluhan tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, tenaga pendamping pasien, perawat, hingga bagian administrasi itu kini tengah menjalani isolasi mandiri.

"Hampir semua profesi yang bekerja di RSUD ada yang isoman. Karena sudah divaksin Covid-19 mereka tidak mengalami gejala berat sehingga kondisinya tidak memburuk pula," ucapnya.

Sumarti mengatakan sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan itu seperti mengurangi pelayanan ruangan rawat inap pasien non Covid-19 sehingga perawat bisa dimobilisasi untuk pen-

anganan Covid-19. Kemudian membuka pendaftaran dan seleksi tenaga kesehatan. Sebanyak 16 dari total 20 orang pelamar dinyatakan lulus dan telah ditempatkan di posisi masing-masing.

Dia menyebut rekrutmen atau seleksi penerimaan tenaga kesehatan yang sempat dilakukan juga belum mampu menjawab kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit pelat merah milik Kabupaten Bekasi itu.

"Rekrutmen telah dilakukan tapi masih juga belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di kami," katanya.

Pihaknya akan terus melakukan rekrutmen perawat sehingga jumlah perawat dapat setara dengan penambahan tempat tidur ruang isolasi pasien Covid-19.

"Hari ini saya ikut rapat bersama Bappeda, BPBD, dan Plh Sekda Kabupaten Bekasi. Salah satu yang akan dibahas adalah jumlah tenaga kesehatan ini," ucapnya.

RSUD Kabupaten Bekasi saat ini berkapasitas 236 tempat tidur isolasi pasien Covid-19 dengan 16 ruangan di antaranya difungsikan khusus bagi pasien Covid-19 bergejala sedang hingga berat dan memiliki riwayat penyakit kritis.

"Saat ini sudah 220 dengan yang critical illness itu sudah 16, berarti 236. Nanti itu kita menuju 317 ruang kalau memang lonjakannya terus meningkat, seperti itu. Cuma permasalahan tadi, keterbatasan SDM," kata dia. ● pra

RIBUAN PEKERJA DIPAKSA PUTAR BALIK KARENA STRP

Pemprov DKI Ubah Kebijakan Pakai Surat Keterangan

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta mengubah kebijakan kepemilikan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) bagi pekerja yang hendak masuk Jakarta. Hal itu merespons peristiwa ribuan pekerja yang hendak ke Jakarta dipaksa diputar balik karena tidak memiliki STRP.

Kepala Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Khalid Triyanto mengatakan, kebijakan STRP akan diubah menjadi surat keterangan agar bisa menjadi lebih mudah. "Itu nanti kebijakan (pengganti STRP) yang akan dikeluarkan oleh dinas surat keterangan oleh Kadisnaker," kata Khalid saat dihubungi melalui telepon, Senin (5/7).

Khalid mengatakan, kebijakan tersebut akan diubah menyusul banyak protes yang disampaikan oleh para pengusaha yang bergerak di sektor esensial dan kritikal. Banyak pekerja mereka tidak bisa beraktivitas di Jakarta lantaran terkena penyekatan besar-besaran di wilayah perbatasan.

"Iya itu (STRP) baru di launching semalam kan tuh. Itu juga ada banyak keluhan dari Aprindo dari Kadin ke kita," ucap dia.

Padahal Aprindo merupakan salah satu sektor esensial yang boleh tetap beroperasi

selama PPKM Darurat berlangsung. Ditambah sulit pengajuan STRP yang sulit untuk diakses oleh para pemohon. Disnakertrans kemudian mengambil langkah membuat surat edaran ke perusahaan esensial dan kritikal untuk mengajukan nama-nama pekerja mereka untuk diizinkan beraktivitas di Jakarta selama PPKM darurat berlangsung.

Perusahaan yang bergerak di sektor esensial dan kritikal mengajukan permohonan lewat email dan melampirkan nama karyawan untuk nantinya diterbitkan surat keterangan oleh Disnakertrans.

"(Akan diberi keterangan) Badan usaha ini masuk kategori esensial, nama-nama karyawannya terlampir, kita strategikan begini. Kalau engga, bisa ribut terus," ucap Khalid.

Khalid menyebut kebijakan surat keterangan yang akan dikeluarkan Disnakertrans akan dijamin langsung oleh Kepala Disnakertrans DKI Jakarta untuk bisa lolos dari penyekatan PPKM Darurat.

"Ini harus ada solusi yang solutif, kasihan, inipun surat keterangan ini pak Kadis yang akan menjamin," tutur dia.

Polisi bakal tindak pemilik atau pemimpin perusahaan non esensial yang masih mempekerjakan pegawai di

kantor saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli 2021.

"Bagi pemilik atau pimpinan perusahaan kalau sudah ada kebijakan WFH, jangan dipaksa pegawai untuk kerja (di kantor), kami akan tindak," ujar Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Yusri Yunus, Senin.

Yusri menegaskan, sejauh ini masih ada perusahaan yang mewajibkan karyawan bekerja di kantor.

Hal itu terlihat dari penumpukan kendaraan di 28 titik penyekatan selama PPKM darurat yang sudah berjalan tiga hari.

Yusri mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan apabila masih ada perusahaan non esensial yang meminta pegawai bekerja di kantor saat PPKM darurat.

"Segera laporkan ke satgas apabila masih menemukan (perusahaan) non esensial dipaksa oleh pemiliknya atau pimpinannya untuk kerja, padahal itu tidak boleh lagi," ucap Yusri.

PPKM Darurat, hanya sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan beroperasi. Dalam dokumen resmi soal PPKM darurat, pemerintah mulai memperketat sejumlah aturan terkait sektor mana saja yang boleh beroperasi. ● yan



IDN: ANT

PENYEKATAN PPKM DARURAT DI JAKARTA

Sejumlah kendaraan bermotor antre melewati posko penyekatan di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/7). Penyekatan dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di lokasi tersebut menyebabkan kemacetan panjang dari kawasan Matraman menuju Pasar Senen.



PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PERBERITAHAUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") direncanakan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Panggilan Rapat dan Mata Acara Rapat akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional pada tanggal 21 Juli 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 20 Juli 2021.

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan. Usulan dan penjelasan harus disampaikan melalui surat tercatat kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat pada jam kantor Perseroan.

Menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik Junco Surat Otoritas Jasa Keuangan dan No.S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara Elektronik dan No. : S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas elektronik General Meeting System KSEI (Easy KSEI) dalam taatan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 06 Juli 2021
PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk
Direksi